

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti tahan terhadap berbagai guncangan krisis ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Definisi ini menjadi dasar hukum utama yang membedakan usaha mikro dari kategori usaha kecil dan menengah, sekaligus menjadi rujukan bagi berbagai kebijakan pemberdayaan UMKM di tingkat nasional maupun daerah. Klasifikasi usaha mikro ini juga menjadi penting dalam penelitian ini karena objek yang dianalisis, yaitu jumlah usaha mikro per kecamatan di Kota Bandung, mengacu langsung pada definisi hukum tersebut.

Kriteria usaha mikro selanjutnya diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Pembaruan ini mengubah basis penilaian kriteria usaha mikro menjadi dua indikator utama. Pertama, berdasarkan modal usaha, yaitu usaha dengan modal paling banyak Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kedua, berdasarkan hasil penjualan tahunan, yaitu usaha dengan omzet paling banyak Rp2 miliar. Perubahan basis penilaian dari sebelumnya yang diatur dalam UU 20/2008 menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan terhadap kondisi ekonomi terkini, khususnya terkait ambang batas modal dan omzet yang menjadi acuan klasifikasi usaha.

UMKM memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional karena menyerap mayoritas tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap PDB. Al Farisi *et al.* (2022) menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyerap tenaga kerja di berbagai lapisan. Peran strategis ini menjadikan pertumbuhan dan persebaran UMKM di suatu wilayah sebagai indikator penting bagi perencanaan ekonomi daerah, termasuk dalam konteks penentuan wilayah prioritas pengembangan usaha mikro seperti yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, pemahaman terhadap definisi, kriteria, dan peran UMKM menjadi landasan konseptual sebelum membahas lebih lanjut mengenai variabel-variabel yang memengaruhi keberhasilan usaha mikro di suatu kecamatan.

2.1.2 Pemilihan Lokasi Usaha

Para pelaku UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam pemilihan lokasi usaha yang strategis karena proses seleksi lokasi yang dilakukan masih bersifat subjektif dan tidak berbasis data. Adhiarta *et al.* (2021) menemukan bahwa calon pelaku UMKM umumnya memiliki kriteria tersendiri mengenai lokasi ideal sesuai preferensi masing-masing, sehingga penentuan lokasi cenderung menghasilkan keputusan yang subjektif dan bervariasi antar individu. Kondisi ini mendorong munculnya pendekatan berbasis data dan metode kuantitatif dalam menentukan wilayah yang layak dijadikan prioritas pengembangan usaha mikro, alih-alih hanya mengandalkan penilaian intuitif pelaku usaha. Penentuan lokasi usaha yang strategis tetap memerlukan pemahaman terhadap faktor-faktor apa saja yang secara empiris terbukti memengaruhi keberhasilan sebuah lokasi usaha.

Pemilihan lokasi usaha merupakan salah satu keputusan strategis yang sangat memengaruhi keberhasilan sebuah usaha. Lokasi yang tepat dapat memberikan keunggulan kompetitif berupa aksesibilitas yang baik, kedekatan dengan pasar potensial, dan minimnya persaingan langsung. Rosiana dan Cahyani (2024) menyatakan bahwa pemilihan lokasi usaha yang optimal dan strategis merupakan faktor penentu keberhasilan bisnis bagi para perintis usaha, di mana lokasi yang

dipilih secara cermat dapat memengaruhi biaya tetap maupun biaya variabel usaha dalam jangka menengah dan panjang. Faktor lokasi ini menjadi semakin krusial bagi usaha mikro yang umumnya memiliki keterbatasan modal, sehingga kesalahan dalam pemilihan lokasi dapat berdampak langsung pada keberlangsungan usaha dalam jangka pendek.

Arysespajayadi *et al.* (2026) melalui model prediktif berbasis data geografis-demografis menemukan bahwa jumlah penduduk merupakan variabel paling dominan dalam menentukan kelayakan suatu lokasi usaha, diikuti oleh ketersediaan fasilitas umum dan kepadatan kompetitor di sekitarnya. Temuan tersebut menegaskan bahwa demografi konsumen dan tingkat persaingan merupakan variabel utama yang menentukan potensi keberhasilan lokasi usaha. Senada dengan hal tersebut, Mutianisa dan Cahyani (2024) menyimpulkan bahwa ketepatan pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor krusial yang dipertimbangkan pengusaha sebelum memulai bisnis, karena lokasi yang sesuai seringkali menjadi penentu utama keberhasilan jangka panjang. Kesamaan temuan dari kedua penelitian tersebut memperkuat argumen bahwa variabel kependudukan dan persaingan usaha secara konsisten muncul dalam literatur sebagai penentu kelayakan lokasi usaha.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi antara lain adalah kepadatan penduduk di sekitar lokasi, jumlah usaha sejenis yang sudah ada (kompetitor), karakteristik demografis calon konsumen, dan potensi pasar yang belum terlayani. Hidayat *et al.* (2025) menambahkan bahwa lokasi usaha harus mempertimbangkan pencapaian pasar, biaya operasional, dan pengelolaan sumber daya, karena ketiga aspek tersebut secara langsung memengaruhi kelangsungan hidup usaha. Pendekatan kuantitatif berbasis data dapat membantu pelaku usaha mikro dalam membuat keputusan lokasi yang lebih objektif dan terukur, dibandingkan hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman pribadi semata. Kombinasi variabel kepadatan penduduk, jumlah usaha sejenis, dan karakteristik demografis inilah yang menjadi dasar pertimbangan kriteria dalam penelitian ini.

2.1.3 *Multiple Criteria Decision Making (MCDM)*

MCDM adalah pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan lebih dari satu kriteria secara bersamaan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah pilihan yang tersedia. Berbagai teknik dalam MCDM telah banyak digunakan oleh para pengambil keputusan, di antaranya AHP, ANP, TOPSIS, VIKOR, SAW, ELECTRE, dan MPE, yang masing-masing memiliki pendekatan matematis tersendiri namun bertujuan sama yaitu menghasilkan rekomendasi yang objektif dan terukur. Dalam berbagai literatur, MCDM juga dikenal dengan istilah *Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA)*; kedua istilah ini merujuk pada kerangka konseptual yang sama dan sering digunakan secara bergantian. Pendekatan MCDM banyak diterapkan pada permasalahan yang melibatkan *trade-off* antar kriteria, di mana alternatif terbaik pada satu kriteria belum tentu menjadi yang terbaik pada kriteria lainnya, sehingga dibutuhkan metode yang mampu mengagregasi seluruh kriteria tersebut secara sistematis.

Menurut Taherdoost dan Madanchian (2023), secara umum permasalahan MCDM terbagi menjadi dua kategori besar. Pertama, *Multi-Objective Decision Making (MODM)* yang berfokus pada optimasi beberapa tujuan secara bersamaan, umumnya digunakan dalam persoalan perencanaan dan desain. Kedua, *Multi-Attribute Decision Making (MADM)* yang berfokus pada evaluasi dan pemilihan dari sejumlah alternatif yang sudah terdefinisi berdasarkan beberapa atribut atau kriteria. Penelitian ini termasuk dalam kategori MADM, karena melibatkan perbandingan 30 kecamatan sebagai alternatif berdasarkan empat kriteria yang telah ditetapkan.

Struktur dasar MCDM berbentuk matriks keputusan yang terdiri dari m alternatif dan n kriteria. Setiap alternatif dievaluasi terhadap setiap kriteria sehingga menghasilkan nilai x_{ij} , di mana i mewakili alternatif dan j mewakili kriteria. Matriks keputusan ini umumnya melalui proses normalisasi dan pembobotan terlebih dahulu sebelum diproses lebih lanjut oleh metode MCDM yang dipilih, agar setiap kriteria dapat dibandingkan pada skala yang setara meskipun memiliki satuan pengukuran yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, metode TOPSIS

dipilih dari keluarga MCDM karena kemampuannya menghasilkan perangkingan berdasarkan jarak geometris terhadap solusi ideal, yang sesuai dengan karakteristik data numerik dari BPS Kota Bandung.

2.1.4 *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)*

TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali dikembangkan oleh Hwang dan Yoon pada tahun 1981. Prinsip dasar dari metode TOPSIS adalah mencari alternatif terbaik yang memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif dalam konteks geometris menggunakan metrik jarak *Euclidean*. Metode ini bekerja dengan menormalisasi matriks keputusan, memberi bobot pada setiap kriteria, kemudian menghitung jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, sebelum akhirnya menghasilkan nilai preferensi yang menjadi dasar perangkingan. Metode TOPSIS dipilih dalam penelitian ini karena kemampuannya menangani banyak kriteria secara simultan, menghasilkan perangkingan yang terukur secara matematis, dan relatif mudah dipahami serta diimplementasikan menggunakan data sekunder.

TOPSIS memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan meskipun menawarkan keunggulan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Salah satu keterbatasan utama adalah fenomena *rank reversal*, yaitu perubahan urutan peringkat alternatif ketika terdapat penambahan atau penghapusan salah satu alternatif dari himpunan yang sedang dievaluasi, meskipun data alternatif lain tidak berubah. Menurut Yang et al. (2022), fenomena ini menjadi salah satu faktor yang menurunkan kredibilitas TOPSIS sebagai metode pengambilan keputusan multikriteria, khususnya dalam lingkungan data yang bersifat dinamis. Selain itu, TOPSIS pada dasarnya mengasumsikan bahwa setiap kriteria bersifat independen satu sama lain, sehingga metode ini kurang tepat digunakan apabila terdapat keterkaitan atau saling memengaruhi antar kriteria. Keterbatasan lain terletak pada sensitivitas hasil perangkingan terhadap metode normalisasi yang digunakan pada matriks keputusan; pemilihan metode normalisasi yang berbeda berpotensi menghasilkan urutan peringkat akhir yang berbeda meskipun data mentah yang

digunakan sama. Dalam konteks penelitian ini, potensi *rank reversal* relatif dapat diminimalkan karena jumlah alternatif (kecamatan) dan kriteria bersifat tetap sejak awal penelitian dan tidak mengalami penambahan atau pengurangan selama proses analisis, namun keterbatasan terkait asumsi independensi antar kriteria dan sensitivitas normalisasi tetap menjadi catatan metodologis yang perlu diakui.

Beberapa penelitian dalam perkembangannya mengombinasikan metode AHP dengan TOPSIS dalam pendekatan hybrid yang dikenal sebagai AHP-TOPSIS, di mana AHP berperan dalam tahap pembobotan kriteria melalui perbandingan berpasangan antar kriteria menggunakan skala Saaty 1-9, sedangkan TOPSIS berperan dalam tahap perangkingan alternatif. Konsistensi penilaian pakar pada AHP diukur menggunakan *Consistency Ratio* (CR), di mana bobot hanya dapat digunakan apabila $CR \leq 0,10$. Pendekatan ini muncul karena TOPSIS pada dasarnya tidak menyediakan mekanisme baku untuk menentukan bobot kriteria, sehingga AHP dipilih sebagai salah satu metode pembobotan yang populer dikombinasikan dengannya karena mampu mengakomodasi penilaian kualitatif pakar yang tidak tertangkap oleh data sekunder semata.

AHP-TOPSIS memiliki beberapa kelemahan yang menjadikannya kurang tepat untuk konteks penelitian ini. Bobot yang dihasilkan bersifat subjektif karena sepenuhnya bergantung pada penilaian pakar, sehingga peneliti lain dengan pakar berbeda dapat menghasilkan bobot yang berbeda pula meskipun datanya sama, dan proses ini memerlukan keterlibatan pakar yang memahami konteks UMKM Kota Bandung secara mendalam, yang tidak selalu tersedia. Selain itu, jumlah perbandingan berpasangan yang dibutuhkan tumbuh signifikan seiring bertambahnya kriteria untuk empat kriteria diperlukan enam perbandingan yang konsistensinya harus diverifikasi secara ketat dan bobot yang dihasilkan tidak mencerminkan distribusi data aktual antar kecamatan, sehingga kriteria yang secara data memiliki variasi tinggi berpotensi diberi bobot rendah akibat bias persepsi pakar.

Penelitian ini memilih pendekatan *entropy weighting* sebagai pengganti AHP dalam tahap pembobotan karena beberapa alasan. Data yang digunakan bersumber dari BPS Kota Bandung yang bersifat numerik, terukur, dan memiliki variasi yang

cukup antar kecamatan, sehingga distribusi data sendiri sudah cukup informatif untuk menentukan bobot secara objektif. Bobot yang dihasilkan *entropy weighting* sepenuhnya ditentukan oleh data aktual tanpa melibatkan asumsi peneliti maupun penilaian pakar, sehingga hasilnya dapat direproduksi oleh peneliti lain dengan data yang sama, sekaligus menghindari kebutuhan akan keterlibatan pakar sebagaimana disyaratkan AHP yang pada penelitian ini tidak tersedia secara terstruktur. Dengan demikian, kombinasi *entropy weighting* dan TOPSIS yang digunakan dalam penelitian ini menawarkan objektivitas dan reproduktibilitas yang lebih tinggi dibandingkan AHP-TOPSIS dalam konteks perangkingan wilayah administratif berbasis data publik.

Kombinasi *entropy weighting* dengan TOPSIS ini bukan merupakan pendekatan baru, melainkan telah terbukti valid pada penelitian-penelitian sebelumnya. Siregar *et al.* (2021) menerapkan pendekatan hibrid TOPSIS-Entropy untuk menentukan penerima beasiswa prestasi berdasarkan kriteria objektif, dan membuktikan bahwa kombinasi kedua metode ini mampu menghasilkan perangkingan alternatif yang objektif dan bebas dari bias penilaian subjektif. Pada konteks yang lebih dekat dengan penelitian ini, Pangesti *et al.* (2025) juga menggunakan kombinasi *Entropy* dan TOPSIS untuk menentukan daerah prioritas pembangunan di tingkat kecamatan di Jawa Tengah, yang menunjukkan bahwa kombinasi metode ini relevan diterapkan pada konteks perangkingan wilayah administratif. Kedua penelitian tersebut memperkuat justifikasi penggunaan kombinasi *entropy weighting* dan TOPSIS dalam penelitian ini untuk menentukan prioritas kecamatan berdasarkan data BPS Kota Bandung.

2.1.5 Entropy Weighting

Entropy weighting adalah metode pembobotan objektif yang berasal dari konsep entropi informasi Shannon. Prinsip utamanya adalah bahwa kriteria yang memiliki variasi data lebih besar antar alternatif dianggap mengandung lebih banyak informasi, sehingga diberi bobot yang lebih tinggi. Sebaliknya, kriteria dengan nilai yang hampir seragam di semua alternatif dianggap kurang informatif dan diberi bobot lebih rendah. Perhitungan bobot *entropy* secara umum melibatkan

tahap normalisasi matriks keputusan, perhitungan nilai entropi untuk setiap kriteria, dan konversi nilai entropi tersebut menjadi bobot akhir yang totalnya bernilai satu.

Keunggulan metode ini dibandingkan pembobotan berbasis *judgement* adalah eliminasi bias peneliti dan reproduktibilitas hasil. Bobot yang diperoleh sepenuhnya ditentukan oleh distribusi data aktual, bukan oleh asumsi peneliti. Shen *et al.* (2024) menegaskan bahwa metode *entropy weighting* efektif digunakan untuk menentukan bobot secara objektif pada berbagai domain permasalahan, karena bobot yang dihasilkan murni berasal dari tingkat informasi yang terkandung dalam variasi data itu sendiri, bukan dari penilaian subjektif. Penerapan serupa juga ditemukan pada konteks pengambilan keputusan multikriteria di Indonesia; Wahyudi *et al.* (2024) menggunakan kombinasi *entropy weighting* dengan metode ranking objektif untuk menghasilkan rekomendasi berbasis data tanpa melibatkan penilaian pakar.

Dalam penelitian ini, *entropy weighting* diterapkan pada data keempat kriteria dari 30 kecamatan di Kota Bandung sebelum dimasukkan ke dalam perhitungan TOPSIS. Pemilihan *entropy weighting* ini konsisten dengan justifikasi yang telah dibahas pada sub-bab 2.1.4, yaitu ketersediaan data numerik dengan variasi yang cukup antar kecamatan sebagai dasar pembobotan objektif. Dengan demikian, seluruh tahapan penelitian ini mulai dari pembobotan kriteria hingga perbandingan alternatif dilakukan sepenuhnya berbasis data tanpa melibatkan penilaian subjektif dari pakar maupun peneliti.

2.1.6 Kriteria Penilaian

Penetapan keempat kriteria (C1-C4) dalam penelitian ini tidak dilakukan secara acak, melainkan merujuk pada pola penggunaan variabel serupa dalam kajian-kajian lokasi usaha dan wilayah yang telah dilakukan sebelumnya. Setiap kriteria ditelusuri landasan konseptualnya dari literatur yang relevan, baik dari kajian keruangan (spasial) maupun kajian ekonomi wilayah, sebelum dioperasionalkan menjadi variabel terukur dalam penelitian ini. Penelusuran ini mencakup kajian mengenai basis populasi, aglomerasi usaha, hingga luas pasar bagi suatu unit usaha, yang masing-masing menjadi rujukan konseptual bagi salah satu dari keempat kriteria yang digunakan. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan

bahwa keempat kriteria yang digunakan memiliki dasar teoretis yang jelas, bukan sekadar dipilih karena ketersediaan data semata.

Salah satu rujukan konseptual yang relevan adalah kajian Afrianita *et al.* (2022) yang mengaplikasikan pendekatan tempat pusat (*central place*) pada analisis jaringan pelayanan sarana perdagangan di Pulau Karimun Besar. Kajian tersebut menegaskan bahwa besaran basis populasi suatu wilayah menjadi penentu utama viabilitas layanan/usaha di wilayah tersebut. Pendekatan ini relevan dengan penetapan kriteria C1 (Kepadatan Penduduk) dan C3 (Jumlah Kepala Keluarga), karena keduanya sama-sama merepresentasikan besarnya basis populasi/rumah tangga yang berpotensi menjadi konsumen di suatu kecamatan. Semakin besar basis populasi suatu kecamatan, semakin tinggi pula potensi permintaan yang dapat diserap oleh usaha mikro yang beroperasi di wilayah tersebut.

Kriteria C2 (Jumlah Usaha Mikro), penelitian ini merujuk pada kajian Nainggolan (2024) mengenai aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan studi kasus Provinsi Jawa Barat. Kajian tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi (aglomerasi) unit-unit usaha pada suatu wilayah dapat mendorong efisiensi bersama, namun pada titik tertentu konsentrasi yang berlebihan berpotensi menimbulkan kejenuhan pasar dan persaingan yang merugikan (deaglomerasi). Prinsip ini relevan untuk operasionalisasi C2 sebagai indikator tingkat konsentrasi sekaligus potensi kejenuhan persaingan usaha mikro di suatu kecamatan. Dengan demikian, jumlah usaha mikro yang telah beroperasi di suatu kecamatan tidak hanya mencerminkan geliat ekonomi lokal, tetapi juga menjadi indikator tingkat persaingan yang perlu dipertimbangkan calon pelaku usaha baru.

Kriteria C4 (Rasio Pasar per Kompetitor), penelitian ini mengacu pada gagasan luas pasar yang tersedia bagi suatu unit usaha, yang berbanding lurus dengan jumlah konsumen potensial dan berbanding terbalik dengan jumlah pesaing yang beroperasi di wilayah yang sama. Gagasan ini sejalan dengan temuan Hidayat *et al.* (2025) yang menggunakan variabel tingkat persaingan dan aksesibilitas pasar sebagai kriteria kuantitatif dalam penentuan lokasi usaha. Berdasarkan hal tersebut, C4 dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai rasio Jumlah Kepala Keluarga (C3) terhadap Jumlah Usaha Mikro (C2), sebagai proksi luas pasar yang tersedia

bagi setiap unit usaha. Semakin tinggi nilai rasio ini pada suatu kecamatan, semakin besar pula peluang pasar yang tersisa bagi pelaku usaha mikro yang baru masuk ke wilayah tersebut.

Penetapan keempat kriteria juga didukung oleh pola penggunaan variabel serupa dalam penelitian terapan lain. Arysespajayadi *et al.* (2026) melalui model prediktif berbasis data geografis-demografis mengoperasionalkan jumlah penduduk, kepadatan kompetitor, dan ketersediaan fasilitas umum sebagai variabel penentu kelayakan lokasi usaha, yang secara konseptual sejalan dengan operasionalisasi C1 dan C2 dalam penelitian ini. Kesamaan variabel yang digunakan pada penelitian terapan tersebut memperkuat justifikasi bahwa keempat kriteria yang dipilih dalam penelitian ini bukan merupakan pilihan yang berdiri sendiri, melainkan konsisten dengan pola yang telah digunakan pada studi-studi sejenis sebelumnya.

Ketersediaan data publik juga menjadi pertimbangan praktis dalam penetapan keempat kriteria. Keempat kriteria dipilih karena datanya tersedia secara lengkap dan terukur dalam publikasi resmi BPS Kota Bandung hingga tingkat kecamatan, sehingga dapat digunakan langsung tanpa estimasi maupun asumsi tambahan. Ketersediaan data resmi hingga tingkat kecamatan ini sejalan dengan prinsip objektivitas yang dianut dalam pendekatan *entropy weighting*, di mana bobot kriteria ditentukan sepenuhnya oleh distribusi data aktual. Dengan demikian, pemilihan keempat kriteria dalam penelitian ini mempertimbangkan baik landasan teoretis dari literatur terdahulu maupun kelayakan praktis dari sisi ketersediaan data.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh berbagai studi terdahulu yang relevan dengan penggunaan MCDM, khususnya metode TOPSIS dan teknik pembobotan objektif. Studi-studi tersebut mencakup penerapan TOPSIS pada berbagai domain, mulai dari pemilihan lokasi usaha, penanganan bencana, hingga perangkingan wilayah administratif berdasarkan kriteria sosial maupun ekonomi. Perbandingan dengan penelitian-penelitian tersebut penting dilakukan untuk menunjukkan posisi

penelitian ini di antara studi sejenis, baik dari sisi metode maupun objek kajian. Berikut adalah tinjauan terhadap penelitian-penelitian tersebut yang diurutkan berdasarkan kemiripan metodologi dan objek kajian.

Nurfaizah *et al.* (2024) melakukan penelitian tentang penentuan lokasi usaha bisnis di Kabupaten Pangkep menggunakan metode TOPSIS. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa TOPSIS efektif digunakan dalam meranking alternatif lokasi berdasarkan kriteria yang ditentukan, serta berhasil menghasilkan rekomendasi lokasi usaha yang objektif bagi pelaku bisnis retail. Relevansi penelitian ini terletak pada penggunaan TOPSIS untuk kasus lokasi usaha, namun perbedaan utamanya adalah Nurfaizah *et al.* menggunakan pembobotan manual/konsensus, sedangkan penelitian ini menerapkan *entropy weighting* berbasis data BPS. Perbedaan pendekatan pembobotan ini menjadi salah satu poin pembeda utama yang membedakan tingkat objektivitas hasil kedua penelitian.

Oprasto (2023) juga menerapkan metode TOPSIS untuk pemilihan lokasi usaha strategis dengan mengevaluasi beberapa alternatif lokasi berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TOPSIS mampu menghasilkan rekomendasi lokasi yang objektif dan terukur. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada cakupan analisis; Oprasto hanya mencakup satu unit usaha tanpa pembobotan objektif yang kompleks, sedangkan penelitian ini meranking 30 kecamatan secara menyeluruh dengan pendekatan pembobotan berbasis data. Skala cakupan yang jauh lebih luas ini menuntut metode pembobotan yang objektif dan dapat direproduksi, alih-alih pembobotan sederhana yang cukup diterapkan pada studi kasus tunggal.

Darmawan *et al.* (2021) menerapkan metode TOPSIS dalam sistem pendukung keputusan untuk meranking kota-kota yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penelitian ini relevan secara metodologis karena membuktikan kemampuan TOPSIS dalam perangkingan wilayah administratif berdasarkan multikriteria. Namun, konteks penelitian Darmawan berfokus pada kebijakan kesehatan masyarakat, sementara penelitian ini berfokus pada potensi ekonomi dan kelayakan lokasi UMKM. Perbedaan domain ini menunjukkan fleksibilitas TOPSIS sebagai metode perangkingan yang dapat diterapkan lintas

bidang, selama unit analisisnya berupa wilayah administratif dengan multikriteria yang terukur.

Rahayu dan Nada (2022) mengembangkan sistem pendukung keputusan menggunakan metode TOPSIS untuk menentukan bidang UMKM yang paling diminati. Penelitian ini membuktikan efektivitas TOPSIS dalam pengambilan keputusan multikriteria di konteks UMKM. Perbedaannya terletak pada fokus objek; Rahayu dan Nada berfokus pada jenis/bidang usaha, sedangkan penelitian ini berfokus pada lokasi geografis pengembangan usaha. Kedua fokus objek tersebut sebenarnya saling melengkapi, karena penentuan bidang usaha yang diminati dan penentuan lokasi yang strategis merupakan dua pertimbangan berbeda yang sama-sama dibutuhkan pelaku UMKM dalam merintis usaha.

Isyriyah *et al.* (2024) mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk penentuan lokasi usaha kuliner di Malang menggunakan pendekatan hybrid AHP-TOPSIS. Penelitian ini menyoroti efektivitas kombinasi metode dalam menangani kompleksitas kriteria lokasi. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada teknik pembobotan kriteria. Isyriyah *et al.* menggunakan AHP yang bersifat subjektif berdasarkan *Pairwise Comparison* pakar. Sebaliknya, penelitian ini menerapkan metode *Entropy Weighting* yang bersifat objektif berbasis data sekunder dari BPS untuk meminimalisir bias manusia dalam menentukan bobot kriteria.

Utama dan Ikhwan (2025) mengembangkan SPK berbasis AHP-TOPSIS untuk menentukan prioritas alokasi sumber daya penanganan multi-bencana di 9 kecamatan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini relevan secara struktural karena sama-sama meranking kecamatan sebagai alternatif keputusan. Perbedaan utamanya kembali terletak pada metode pembobotan; AHP yang digunakan Utama dan Ikhwan bersifat subjektif (*expert judgment*), sedangkan penelitian ini menggunakan *entropy weighting* yang sepenuhnya objektif berbasis distribusi data aktual. Kesamaan unit analisis berupa kecamatan pada kedua penelitian ini memperkuat relevansi metodologis TOPSIS untuk perbandingan wilayah administratif secara umum, terlepas dari domain permasalahan yang berbeda.

Simanjuntak *et al.* (2023) mengimplementasikan metode *hybrid* AHP-TOPSIS untuk menentukan prioritas penanganan jembatan di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan kriteria sosial dan teknis. Penelitian ini menjadi pembanding dalam penggunaan MCDM untuk penentuan prioritas wilayah administratif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian berupa infrastruktur fisik dengan pembobotan subjektif AHP, sedangkan penelitian ini berfokus pada potensi ekonomi kecamatan dengan pembobotan objektif *entropy weighting*. Meskipun objek penelitiannya berbeda jauh, kesamaan penggunaan TOPSIS sebagai metode perangkingan akhir menunjukkan luasnya cakupan penerapan metode ini pada berbagai persoalan pengambilan keputusan berbasis wilayah.

Adhiarta *et al.* (2021) mengembangkan SPK pemilihan lokasi awal usaha bagi UMKM di Kabupaten Bandung Barat menggunakan metode AHP dengan bantuan *Geographic Information System* (GIS). Penelitian ini menegaskan bahwa pemilihan lokasi UMKM berbasis data memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan usaha. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada metode inti; Adhiarta mengandalkan AHP murni yang rentan terhadap subjektivitas pakar, sementara penelitian ini menggabungkan objektivitas data melalui entropy dan ketepatan ranking melalui TOPSIS. Penggunaan GIS pada penelitian Adhiarta juga menunjukkan adanya variasi pendekatan visualisasi hasil yang dapat menjadi pertimbangan pengembangan lebih lanjut bagi penelitian ini.

Heriyani *et al.* (2024) membangun SPK pemilihan lokasi usaha UMKM menggunakan metode ARAS. Penelitian tersebut menghasilkan rekomendasi alternatif lokasi terbaik melalui perangkingan nilai kinerja relatif. Penelitian ini menjadi pembanding dalam keluarga metode MCDM yang digunakan untuk persoalan serupa, menunjukkan bahwa berbagai metode ranking dapat diaplikasikan, namun penelitian ini memilih TOPSIS karena kemudahannya dalam interpretasi jarak solusi ideal positif dan negatif. Perbandingan dengan metode ARAS ini menegaskan bahwa pemilihan TOPSIS dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan interpretabilitas hasil, bukan semata-mata karena ketiadaan alternatif metode lain.

Elyana *et al.* (2026) menggunakan kombinasi metode *Entropy* dan WASPAS untuk menentukan wilayah produksi padi terbaik di Indonesia berbasis data BPS. Penelitian ini sangat relevan secara metodologis karena pendekatan *entropy weighting* identik dengan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghasilkan pembobotan yang objektif dan bebas bias peneliti. Perbedaannya terletak pada metode perangkingan akhir (WASPAS vs TOPSIS) serta domain penelitian (pertanian vs pengembangan UMKM). Hal ini memperkuat argumen bahwa kombinasi *entropy weighting* dengan metode ranking seperti TOPSIS valid dan efektif untuk pengolahan data statistik makro.

Febrian dan Irawan (2026) menerapkan pendekatan *hybrid* AHP-TOPSIS untuk menentukan prioritas pembangunan wilayah di Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini turut memvalidasi relevansi metode TOPSIS dalam konteks perangkingan wilayah berbasis multikriteria. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada teknik pembobotan; Febrian dan Irawan menggunakan AHP yang bersifat subjektif berdasarkan penilaian pakar, sedangkan penelitian ini menerapkan TOPSIS murni dengan pembobotan *entropy weighting* yang sepenuhnya objektif berbasis data BPS, tanpa melibatkan *pairwise comparison* maupun penilaian pakar. Konsistensi penggunaan AHP-TOPSIS pada penelitian ini dan beberapa penelitian sejenis lain yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan *hybrid* tersebut masih menjadi pilihan populer, meskipun penelitian ini secara khusus memilih pendekatan yang sepenuhnya objektif.

Prabandari *et al.* (2021) menggunakan metode TOPSIS untuk menentukan skala prioritas pengembangan potensi mata air untuk irigasi di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Penelitian ini relevan secara struktural karena sama-sama menjadikan kecamatan sebagai unit analisis dalam penentuan prioritas pengembangan wilayah. Perbedaannya terletak pada domain penelitian; Prabandari *et al.* berfokus pada potensi sumber daya air untuk irigasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada potensi ekonomi kecamatan untuk pengembangan usaha mikro dengan pembobotan kriteria yang objektif. Kesamaan penggunaan kecamatan sebagai unit analisis pada penelitian ini melengkapi rangkaian bukti bahwa TOPSIS

merupakan metode yang konsisten diterapkan pada berbagai persoalan perangkungan wilayah administratif di Indonesia.

2.3 Kerangka Pemikiran

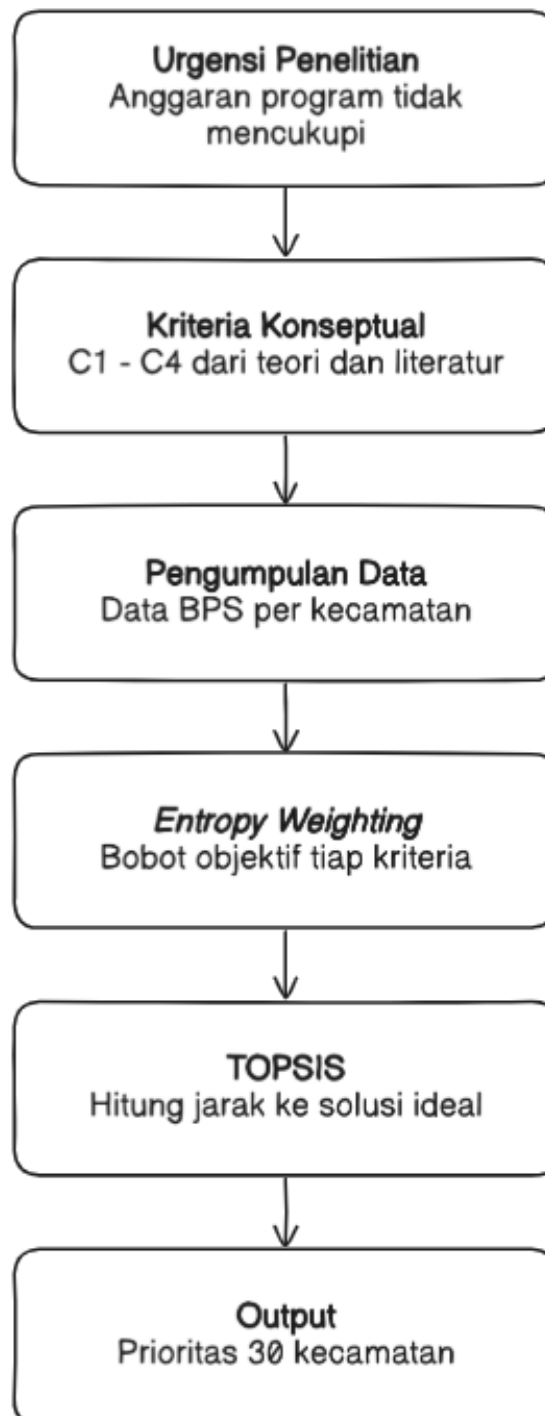
Kerangka pemikiran penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur logis dalam menjawab tujuan penelitian, yaitu menentukan prioritas kecamatan di Kota Bandung untuk pengembangan usaha mikro. Pemerintah Kota Bandung telah mencanangkan program pengembangan usaha mikro lintas kecamatan secara resmi melalui Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2026, namun pelaksanaannya menghadapi kendala nyata dari sisi anggaran, sehingga tidak seluruh kecamatan dapat ditangani secara serentak. Kondisi ini menjadi dasar perlunya suatu metode pengambilan keputusan yang mampu mengevaluasi dan mengurutkan kecamatan secara objektif dan terukur berdasarkan beberapa kriteria yang relevan, sebagai alat bantu penentuan prioritas di tengah keterbatasan sumber daya tersebut. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini berangkat dari kesenjangan antara luasnya cakupan program pemerintah dan terbatasnya anggaran yang tersedia untuk merealisasikannya secara menyeluruh.

Berdasarkan kajian teori lokasi usaha serta kajian pustaka mengenai metode MCDM, penentuan prioritas lokasi pengembangan usaha memerlukan evaluasi terhadap beberapa kriteria yang saling berkaitan. Dalam penelitian ini, ditetapkan empat kriteria yaitu Kepadatan Penduduk (C1) yang mencerminkan basis populasi/potensi pasar, Jumlah Usaha Mikro (C2) yang mencerminkan tingkat kejenuhan atau kompetisi, Jumlah Kepala Keluarga (C3) yang mencerminkan basis rumah tangga sebagai unit konsumsi potensial, serta Rasio Pasar per Kompetitor (C4) yang mencerminkan luas pasar yang tersedia bagi setiap unit usaha relatif terhadap tingkat persaingan. Keempat kriteria ini dipilih karena secara konseptual saling melengkapi, di mana C1 dan C3 merepresentasikan sisi permintaan (basis populasi/rumah tangga), sedangkan C2 dan C4 merepresentasikan sisi penawaran dan tingkat persaingan usaha. Kombinasi keempat sudut pandang tersebut memungkinkan penilaian kelayakan suatu kecamatan dilakukan secara lebih menyeluruh, dibandingkan hanya mengandalkan satu kriteria tunggal.

Keempat kriteria tersebut selanjutnya dioperasionalkan menggunakan data sekunder resmi BPS Kota Bandung yang tersedia hingga tingkat kecamatan, sehingga penentuan prioritas wilayah dapat dilakukan secara terukur dan berbasis data, tanpa bergantung pada pertimbangan administratif maupun subjektif semata. Penggunaan data sekunder resmi ini juga memastikan bahwa proses penentuan prioritas dapat direproduksi oleh pihak lain menggunakan sumber data yang sama. Ketersediaan data hingga tingkat kecamatan menjadi prasyarat penting, mengingat unit analisis dalam penelitian ini adalah 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode *Entropy Weighting* untuk mengintegrasikan keempat kriteria tersebut ke dalam satu penilaian yang objektif, guna menghasilkan bobot kriteria berdasarkan variasi data tanpa dipengaruhi penilaian subjektif pengambil keputusan. Bobot yang dihasilkan kemudian digunakan dalam metode TOPSIS untuk melakukan perangkingan kecamatan berdasarkan kedekatannya terhadap solusi ideal positif dan jaraknya dari solusi ideal negatif. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini menghasilkan urutan prioritas kecamatan yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan usaha mikro. Kedua metode ini digunakan secara berurutan dan saling melengkapi, di mana *Entropy Weighting* berperan pada tahap pembobotan dan TOPSIS berperan pada tahap perangkingan akhir.

Penelitian ini bersifat deskriptif-evaluatif dengan pendekatan *Multi-Attribute Decision Making*, sehingga kerangka pemikiran ini tidak diarahkan pada perumusan hipotesis statistik, melainkan pada alur berpikir sistematis yang menghubungkan rumusan masalah, kajian teori, kriteria penelitian, metode analisis, hingga hasil akhir berupa rekomendasi prioritas kecamatan. Alur ini dimulai dari identifikasi permasalahan keterbatasan anggaran pemerintah, dilanjutkan dengan penetapan kriteria berbasis kajian teori, pengolahan data melalui *Entropy Weighting* dan TOPSIS, hingga akhirnya menghasilkan rekomendasi urutan prioritas kecamatan. Dengan alur berpikir tersebut, kerangka pemikiran ini menjadi landasan konseptual yang menghubungkan seluruh tahapan penelitian secara koheren, mulai dari latar belakang masalah hingga luaran akhir penelitian.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran